

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

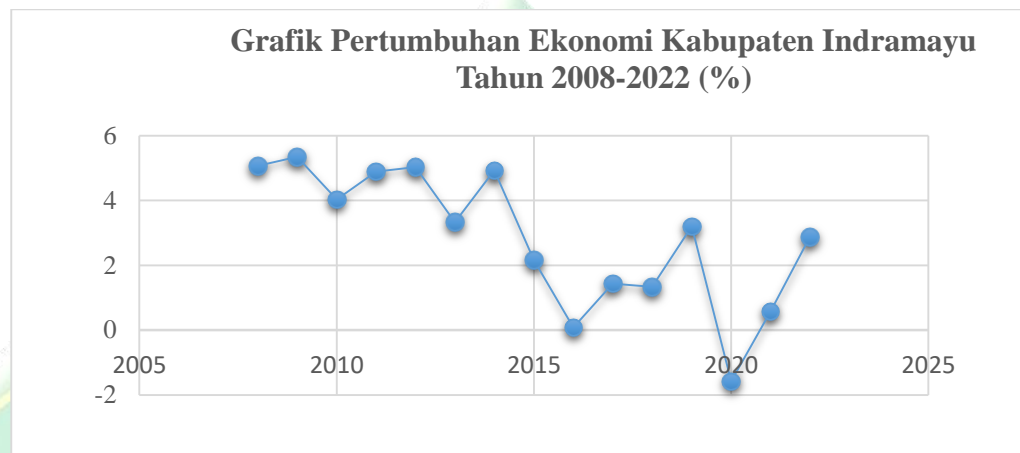
Indonesia termasuk kedalam Negara berkembang dengan taraf pembangunan ekonomi yang masih relatif rendah. Dalam hal ini peranan pemerintah sangat diperlukan untuk melakukan intervensi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan (Sisilia dan Harsono, 2021). Pertumbuhan ekonomi memiliki peranan yang signifikan bagi pemerintah pusat maupun daerah karena pertumbuhan ekonomi dapat mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan identifikasi terhadap potensi-potensi yang ada pada setiap wilayah dan memanfaatkannya secara optimal, baik dalam hal sumber daya alam maupun manusianya (Pramana, 2022).

Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan *output* dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu Negara maupun daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui beberapa indikator, termasuk pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, kesejahteraan penduduk, dan nilai Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan untuk wilayah regional pertumbuhan ekonomi dapat dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Baik atas dasar berlaku ataupun atas dasar harga konstan (Prasetyoningrum, 2018).

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Secara spasial, struktur perekonomian dari wilayah Ciayumajakuning pada tahun 2022 didominasi oleh PDRB Kabupaten Indramayu yaitu dengan kontribusi sebesar 37,61%, kemudian Kabupaten Cirebon sebesar 23,47%, Kabupaten Majalengka sebesar 15,65%, Kabupaten Kuningan sebesar 12,63%, dan Kota Cirebon sebesar 11,03% (Baihaqi, 2023). Selama dua tahun terakhir, Kabupaten Indramayu berhasil mengatasi kontraksi ekonomi pada tahun 2020 yang mencapai -1,58%, hal ini merupakan dampak

dari pandemi Covid-19. Upaya penguatan pengendalian telah sukses mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu menjadi positif, yang akhirnya kembali tumbuh sebesar 0,58% pada tahun 2021 (BPS Kabupaten Indramayu, 2020).

Berikut ini merupakan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu periode 2008-2022:



Grafik 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu data diakses dan diolah pada 26 Oktober 2023.

Dari grafik 1.1 dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu selama 15 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada tahun 2009 yaitu sebesar 5.35%. Sedangkan angka penurunan drastis terjadi di tahun 2020 yang tercatat di angka -1.58%. Hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang secara signifikan mempengaruhi kondisi ekonomi pada periode tersebut. Namun pada tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi kembali mengalami kenaikan.

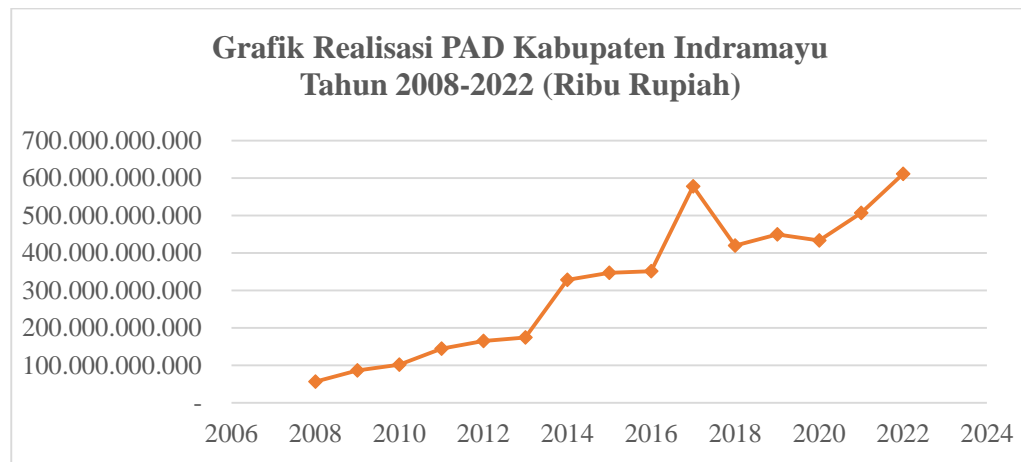
Berdasarkan data diatas, pertumbuhan ekonomi juga dapat dipengaruhi oleh produktivitas dari sektor produksi dalam menggunakan faktor-faktor produksi (Fajrin dan Sudarsono, 2019). Adapun beberapa faktor produksi yang mempengaruhi produktivitas produksi antara lain ialah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal usaha (Hakim, 2020). Dengan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal maka akan mampu meningkatkan *output* yang dihasilkan. Namun apabila pemanfaatan sumber daya alam belum dimaksimalkan maka peningkatan *output* bisa dipengaruhi oleh modal usaha dan

sumber daya manusia (Fajrin dan Sudarsono, 2019). Hal ini dikarenakan ketika pertumbuhan ekonomi naik, jumlah barang dan jasa akan semakin banyak. Yang nantinya akan berdampak kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penilaian suatu Negara ataupun daerah dalam melihat kemajuan suatu Negara ataupun daerah.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah, pada prinsip otonomi dijelaskan bahwa suatu hal yang diserahkan oleh pemerintah yang memiliki tingkat wewenang lebih tinggi kepada entitas yang memiliki tingkat wewenang yang lebih rendah untuk mengatur semuanya secara bebas sesuai dengan urusannya masing-masing (Sufianto, 2020). Yang berarti dalam hal pemerintah pusat telah memberikan kewenangan delegatif kepada pemerintah daerah untuk manajemen dan menangani otonomi secara lebih mandiri dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah”. Hal ini berarti bahwa urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan pemerintahan daerah sebagai wujud dari realisasi otonomi di daerah. Dimana daerah berhak untuk mengatur daerahnya sendiri (Hsb, 2019).

Keberhasilan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang positif tidak semata-mata bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan juga bergantung pada kemampuan pendapatan yang dihasilkan oleh masing-masing daerah. Daerah yang berhasil mengelola potensi ekonominya dengan efektif dan mampu menciptakan sumber pendanaan daerah dapat dianggap telah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pramana, 2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh suatu wilayah atau daerah dari berbagai sumber di dalam lingkup daerah tersebut, yang diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku (Nasir, 2019). PAD antar daerah dipengaruhi oleh potensi dan kemampuan pengelolaannya masing-masing oleh karena itu nilai PAD setiap daerah akan berbeda.

Di bawah ini adalah grafik realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indramayu tahun 2008-2022:



Grafik 1. 2 Grafik Realisasi PAD Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu data diakses dan diolah pada 26 Oktober 2023.

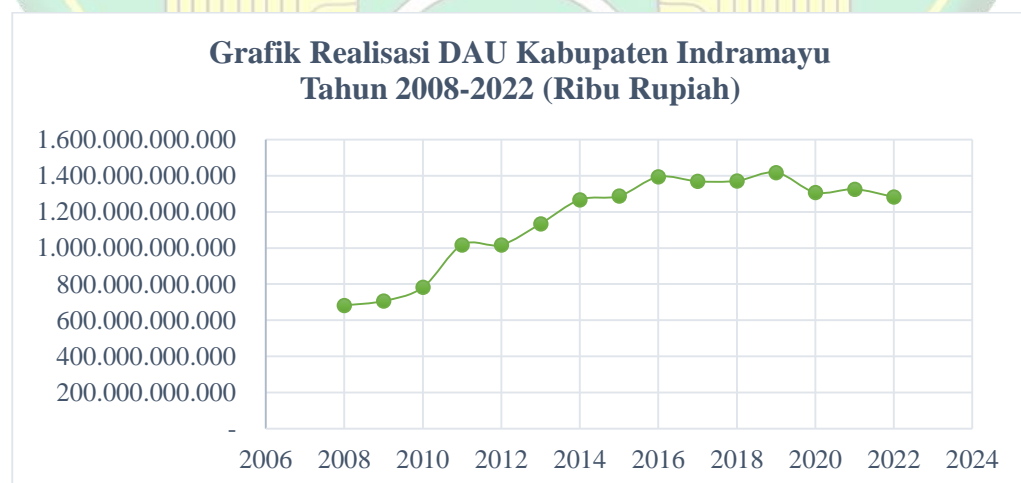
Berdasarkan grafik 1.2 dapat diketahui bahwa nilai PAD tertinggi yaitu berada pada tahun 2022 hal ini disebabkan realisasi PAD Kabupaten Indramayu melebihi target. PAD Kabupaten Indramayu cenderung mengalami peningkatan hanya saja pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan yang semula sebesar Rp. 577.594.379 menjadi Rp. 419.892.815 hal ini disebabkan PAD tidak sesuai dengan yang ditargetkan, kemudian PAD mengalami peningkatan kembali di tahun berikutnya, namun di tahun 2020 PAD Kabupaten Indramayu kembali turun hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19. Pada dua tahun berikutnya PAD Kabupaten Indramayu terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan hal tersebut dikarenakan realisasi penerimaan pajak Kabupaten Indramayu kembali meningkat, dari target awal Rp. 99.115.000.000 menjadi Rp. 114.314.290.396 atau sebesar 115,34%, realisasi retribusi daerah meningkat sebesar 125,91%, realisasi hasil dari kekayaan yang dipisahkan sebesar 107,18% dan realisasi lain-lain PAD yang sah sebesar 107,16% (Diskominfo, 2021).

Dengan demikian keuangan daerah memainkan peran yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Perwujudan dan kesejahteraan masyarakat daerah akan lebih mudah dicapai apabila pemerintah daerah memiliki kondisi keuangan yang baik (Maulina, 2021). Untuk mewujudkan hal tersebut

pemerintah pusat menetapkan pendanaan perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dengan maksud mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yakni UU Nomor 13 Tahun 2005, DAU merupakan suatu bentuk sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan dengan tujuan untuk mengimbangi kemampuan keuangan antar wilayah guna mendukung proses desentralisasi pemerintahan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Agar dapat mengurangi kesenjangan fiskal dalam belanja, dana alokasi umum ditentukan sebesar 26,0% dari penerimaan dalam negeri bersih, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara.

Setiap daerah memiliki perbedaan dalam struktur dan kapasitas fiskalnya dan melalui implementasi kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU), dapat berfungsi sebagai alat untuk mengimbangi ketimpangan fiskal antar daerah. Daerah yang memiliki kapasitas keuangan yang besar namun kebutuhan anggaran yang rendah akan menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dengan porsi yang lebih kecil, sedangkan daerah yang memiliki kapasitas keuangan yang rendah tetapi kebutuhan anggaran yang tinggi akan diberikan alokasi DAU yang lebih besar (Pramana, 2022). Berikut grafik realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Indramayu tahun 2008-2022:



Grafik 1. 3 Grafik Realisasi DAU Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu data diakses dan diolah pada 27 Oktober 2023.

Dari grafik 1.3 dapat diketahui bahwa dalam 15 tahun terakhir realisasi DAU Kabupaten Indramayu mengalami fluktuasi. Bisa dilihat juga realisasi dana alokasi umum terbesar Kabupaten Indramayu berada di tahun 2021. Dimana dana alokasi umum tahun 2019 sebesar Rp. 1.418.027.397. Realisasi dana alokasi umum Kabupaten Indramayu cenderung mengalami kenaikan pada tahun 2012 hingga 2016, namun pada tahun 2017 hingga tahun 2018 DAU mengalami penurunan sebesar 1,58%, kemudian pada tahun 2019 DAU mengalami kenaikan sebesar 4%, tetapi pada tahun 2020 DAU mengalami penurunan lagi sekitar 11% yang diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19. Pada tahun berikutnya realisasi DAU mengalami kenaikan sebesar 1,7%, namun pada tahun berikutnya realisasi DAU kembali menurun sebesar 4,2%.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan signifikan dalam pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti pada penelitian Sisilia (2021) yang menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Malang, hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang terus menerus ditingkatkan pertumbuhannya karena melalui PAD ini dapat diketahui sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Namun berbeda dengan hasil penelitian AlQomariah (2022) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah adalah pendapatan keuangan yang berasal dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah yang dapat digali dan dimanfaatkan sesuai dengan potensi yang tersedia di setiap daerah. Akan tetapi, adanya perbedaan dalam potensi daerah dapat menimbulkan ketidaksetaraan fiskal, dimana wilayah-wilayah dengan potensi yang lebih besar cenderung menghasilkan pendapatan asli daerah yang lebih tinggi, sementara wilayah-wilayah dengan potensi yang lebih rendah akan cenderung memiliki pendapatan asli daerah yang lebih terbatas. Berdasarkan penelitian Sisilia (2021) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Hal ini dikarenakan DAU digunakan untuk memperbaiki infrastruktur

di daerahnya. Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian Arina (2019) yang menyebutkan bahwa dana alokasi umum bertanda negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado, hal ini disebabkan penggunaan dana alokasi umum kurang maksimal sehingga perencanaan alokasi anggaran untuk daerah tidak sesuai dengan apa yang direncanakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2022”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Faktor internal yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu tahun 2008-2022 diperkirakan adanya indikasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
- b. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008 hingga 2022 mengalami fluktuasi.
- c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2008 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi.
- d. Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2008 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dan focus pada penelitian serta mencegah penyimpangan dari tujuan pokok penelitian. Oleh karena itu, maka peneliti akan membatasi masalah penelitian ini pada:

- a. Fokus penelitian ini hanya mengenai pengkajian terhadap pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi.
- b. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Indramayu.
- c. Rentang waktu penelitian dimulai dari tahun 2008 hingga tahun 2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu tahun 2008-2022?
- b. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu tahun 2008-2022?
- c. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu tahun 2008-2022?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu 2008-2022.
2. Menganalisis apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu 2008-2022.
3. Menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu 2008-2022.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademisi
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca serta dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk topik yang relevan dengan fokus penelitian ini.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam optimalisasi dan implementasi sumber-sumber pendapatan secara efektif, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.
3. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada daerah. Sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan pertumbuhan ekonomi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini, menguraikan tentang latar belakang, analisis permasalahan, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, manfaat, dan tujuan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini, memuat terkait landasan teori yang relevan dengan penulisan penelitian ini. Pada bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu, kerangka penelitian serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan unit observasi, jenis dan juga sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, uji prasyarat, analisis korelasi dan, uji statistik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis menyajikan deskripsi data hasil penelitian dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian serta menyajikan pembahasan data penelitian dan juga hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir disertai dengan daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran.